

ABSTRAK

Lagu merupakan suatu karya yang berupa rangkaian nada atau suara dalam urutan, yang di iringi dengan alat music untuk menghasilkan suatu irama atau suara berirama, dan diikuti dengan penambahan lirik yang kemudian menjadi suatu karya cipta yang dimiliki oleh pencipta lagu. Karya cipta tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang atas karya cipta tersebut menimbulkan hak moral dan hak ekonomi bagi penciptanya. Hak ekonomi memberikan hak bagi pencipta untuk menikmati keuntungan ekonomi atas cipta lagu. Namun di Indonesia hak ekonomi dari pencipta lagu seakan tidak diindahkan keberadaannya. Untuk melindungi hak ekonomi hak ekonomi pencipta, maka dibentuklah Lembaga Manajemen Kolektif yang dasar hukumnya terdapat di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan permasalahan yang ada di Indonesia maka penulis meneliti mengenai bagaimana peran Lembaga Manajemen Kolektif sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena dengan adanya aturan terbaru sekalipun, masih belum cukup untuk melindungi pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait karena masih terdapat permasalahan. Sehingga penulis meneliti mengenai kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengenai Lembaga Manajemen Kolektif didalam penerapannya. Lembaga Manajemen Kolektif merupakan badan yg menghimpun dan mendistribusikan royalti untuk para pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik terkait. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian penulis, peran dari Lembaga Manajemen Kolektif masih belum maksimal di dalam penerapannya karena masih terdapat beberapa celah sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta masih sering terjadi, meskipun dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif, jauh lebih baik dari sebelum di undangkan peraturan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis meneliti dengan metode pengambilan data secara deskriptif analitis, dan juga metode penelitian yang penulis gunakan adalah penerapan hukum normatif, yang bersifat kualitatif. Mengenai kedudukan sebuah Lembaga Manajemen Kolektif disaat masih belum jelas aturan yang mengaturnya, atau sebelum adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat beberapa permasalahan dan kebingungan seperti yang penulis teliti didalam rumusan permasalahan kedua yaitu mengenai konsekuensi putusan Mahkamah Agung No.:018K/N/HaKI/2007 antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) melawan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) terhadap kegiatan Lembaga Manajemen Kolektif, yang pada intinya disaat undang-undang hak cipta terbaru ada, kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif sangatlah lemah, sehingga dapat merugikan pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait. Maka dari itu, kesimpulan yang didapat oleh penulis adalah pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif memang sangat diperlukan di Indonesia karena terkait kedudukan dan kepastian hukum lembaga tersebut, dan juga atas adanya permasalahan antara YKCI melawan Telkomsel membuktikan bahwa pentingnya suatu aturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif terhadap kewenangan untuk memungut royalti demi hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait.

ABSTRACT

The song is a masterpiece in the form of a series of tones or sounds in the sequence, which is accompanied by music instrument to generate a rhythm or rhythmic sound, and followed by the addition of lyrics which later became a copyright work owned by songwriter. The copyrighted works protected by “Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta” are on a copyright work raises moral rights and economic rights for creators. Economic rights entitle the creators to enjoy the economic benefits of copyright songs. However, in Indonesia the economic rights of songwriters if not ignored its existence. To protect the economic rights of economic rights of creators Collecting Management Society (Lembaga Manajemen Kolektif) will be established on the legal basis contained in Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Based on the existing problems in Indonesia, the authors examined as to how the role of the Institute collective management before and after the Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, because with the new rules though, is still not enough to protect creators, copyright holders and holders of rights related because there are still problems. So the authors examined on the positions of the Collecting Management Society is governed by Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta regarding the Collecting Management Society that its application. Collecting Management Society is the agency that collects, distributed royalties to the creators. holders of copyright and related owner. But based on the results of the study authors, the role of the Collecting Management Society still not optimally in its application because there are still some loopholes so that violations of copyright is often the case, even with the Collecting Management Society, much better than before in legislated rules Invite oF No. 28 of 2014 on Copyright. Penulis examine the data retrieval methods are descriptive, as well as research methods that I use is the application of normative law, are qualitative. Regarding the position of a Collecting Management Society is still unclear when the rules that govern them, or before the Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Ciptas, there are some problems and confusion as the authors carefully in the formulation of the second issue is about the consequences of the Supreme Court No .: 018K / N / IPR / 2007 between Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) against PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) to the activities of the Collecting Management Society, which is in essence when legislation newest copyright exists, notch Collecting Management Society is very weak, so it can be detrimental creators, holders of copyright and related rights. Therefore, the conclusions obtained by the authors is the setting on the Institute's collective management is very essential in Indonesia related to the status and legal certainty to these institutions, and also on the problems between YKCI against Telkomsel prove that the importance of a rule on the Collecting Management Society of the authority to charge a royalty for the right of economic creators, holders of copyright and related rights.